



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 003 TAHUN 2015

TENTANG

BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 1 15b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Tunjangan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang ...

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor (4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pemimpin dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Tahun 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
14. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 002 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 034 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 002 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; dan
15. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 001 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

5. Wakil Bupati...

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan dengan Peraturan Perundang-undangan;
9. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
12. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
13. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; dan
14. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah Dana yang disediakan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari.

BAB II
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 2

- (1) Kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan fungsi dan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
- (2) Belanja Penunjang Operasional sebagaimana ayat (1) dengan memperhatikan azas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 3

Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2)

Pasal 4

Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah menggunakan formula Kemampuan Keuangan Daerah sama dengan Pendapatan Umum Daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).

Pasal 5

Rincian Pendapatan Umum Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2015 terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 17.008.476.093,-
b. Dana Bagi Hasil/bukan Pajak	Rp. 317.457.288.030,-
c. Dana Alokasi Umum	Rp. 284.332.291.000,-
	+
Jumlah	Rp. 618.798.055.123,-

Pasal 6

Rincian Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah terdiri dari atas gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan PPh pasal 21 sebesar **Rp. 120.011.054.392,- (Seratus Dua Puluh Milyar Sebelas Juta Lima puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).**

Pasal 7

- (1) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pasal 5 sebesar **Rp. 618.798.055.123,-** dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 sebesar **Rp. 120.011.054.392,-** adalah **Rp. 498.787.000.731,-**

(2) Berdasarkan ...

- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dikelompokkan berkemampuan **Keuangan Daerah Tinggi**.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan perhitungan dan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 6, Besar Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayar terhitung mulai tanggal 01 Januari 2015.

Pasal 9

Penyediaan Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana Pasal 8 disediakan dalam pos DPRD

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 2015

PENJABAT BUPATI
-PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, #


H. HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,


H. MUHAMMAD ISNAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2015 NOMOR

- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dikelompokkan berkemampuan **Keuangan Daerah Tinggi**.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan perhitungan dan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 6, Besar Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayar dihitung mulai tanggal 01 Januari 2015.

Pasal 9

Penyediaan Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana Pasal 8 disediakan dalam pos DPRD

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 2015
PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



H. HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,



H. MUHAMMAD ISNAINI
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2015 NOMOR